

Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan (*The factors influencing MSMEs in paying income tax*)

Ali Sandy Mulya

Universitas Budi Luhur

alisandy@outlook.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 6 November 2019

Direvisi pada 21 November 2019

Revisi ke-2 pada 28 November 2019

Disetujui pada 5 Desember 2019

Abstract

Purpose: This study aims to provide an overview and empirical evidence about knowledge & understanding of tax regulations, a good perception of the effectiveness of the taxation system, the level of trust in the system of law and government that affects the desire of MSMEs to pay income tax with economic growth as a moderating variable

Research methodology: The population in this study was MSME entrepreneurs in South Tangerang City - Indonesia in 2018. The data was processed by using SPSS 22.0 program and WarpPLS 5.0.

Results: Knowledge & understanding, good perceptions of the effectiveness of the taxation system and the level of trust in the legal & government system have a significant effect on MSMEs in paying income tax. Economic growth does not moderate the interaction of knowledge, understanding, and the level of trust in the law & government system of MSMEs in paying income tax. Economic growth strengthens the interaction of good perceptions on the effectiveness of the taxation system on MSMEs in paying income tax.

Limitations: The samples were only MSMEs in Serpong and Pamulang Subdistrict, South Tangerang, Indonesia.

Contribution: The impact of economic growth encourages MSMEs to pay taxes. This shows that MSMEs can reallocate resources across sectors to the use of the highest-value economy, increase the efficiency, and it can lead to increase the size of the economy.

Keywords: Knowledge, Perception, Trust, Growth, Willingness

How to cite: Mulya, Ali S. (2019). Faktor - faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membayar pajak penghasilan (PPh). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 1(1), 53-65.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 milyar. Sedangkan menurut PP 23 Tahun 2018 kategori UMKM adalah wajib pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp4,8 Milyar, sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.

Di tengah persaingan bisnis lokal dan internasional yang semakin ketat (Yuliansyah, 2018), UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Mutmainah (2016) dikatakan bahwa kontribusi UMKM semakin baik dalam lima tahun terakhir dan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah mencatat kontribusi UKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dan banyak membantu penyerapan tenaga kerja dan dianggap memiliki peran strategis dalam melawan kemiskinan dan pengangguran.

Kota Tangerang Selatan baru berdiri sejak 26 November 2008 merupakan kota baru yang penuh dengan cita-cita optimis. Dikelilingi oleh berbagai pengembang perumahan yang terkenal membuat kota ini menjadi daya tarik bagi masyarakat terutama yang sudah jenuh dengan ibukota. Hal ini menjadikan kota Tangerang Selatan menjadi magnet masyarakat untuk tinggal maupun membuka usaha di kota ini salah satunya bidang UMKM. Banyaknya UMKM di Kota Tangerang ini, apakah pemasukan pajak UMKM sebanding dengan potensi yang dapat digali?

Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) selaku penghimpun dana perpajakan Indonesia selalu berkembang mengoptimalkan penerimaan pajak, baik dalam melakukan reformasi pajak maupun mencari sumber-sumber baru di bidang penerimaan pajak. Upaya-upaya persuasif terus dilakukan DJP untuk mendorong kemauan WP membayar pajak. Tatiana & Priyo (2009) mengartikan kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan aturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dan tidak mendapat imbal balik secara langsung.

Kemauan, pemahaman dan pengetahuan aturan perpajakan menjadi salah satu hal penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sudjana (2006) menyatakan pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hapalan terhadap materi yang dipelajari agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Selain pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan hal lain yang ingin diteliti penulis dalam penelitian ini. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yaitu penginterpretasian WP terhadap sistem perpajakan di Indonesia sudah efektif dan mampu mencapai target negara dalam mewujudkan efektifitas sistem perpajakan. Helhel & Ahmed (2014) *said tax compliance is affected by broad range of factors such as individual characteristics of tax payers, tax system, tax administration, and economical and political situation in Yemen.*

Tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, hal ini diwujudkan dengan membayar pajak sebagai simbol cinta kepada bangsa dan negara. Hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, aparatur pajak, wajib pajak serta perumusan kebijakan Pemerintah dalam bidang perpajakan sehingga lebih efektif dan penerimaan negara meningkat secara signifikan seiring dengan kemauan wajib pajak membayar pajak khusus UMKM.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Landasan teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Ajzen (1991) TPB merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku.

Relevansi TPB dengan penelitian ini adalah bahwa dalam perilaku seseorang akan melakukan sesuatu atas dasar faktor motivasi dari seseorang yang melakukan sesuatu. Faktor sosial berupa norma atau aturan yang merupakan tekanan yang harus ditaati. Demikian halnya WP UMKM akan berperilaku berdasarkan hal tersebut untuk mau membayar pajak dan selalu berhubungan dengan niat setiap wajib pajak.

2.1.2 Attribution theory

Attribution theory considers the individual as an amateur psychologist who tries to understand the reasons for events that occurred in the face. Attribution theory to try to find what is causing what, or what motivates anyone to do anything. Response that we give to an event depends on our interpretation of the event (Harold Kelley, 1973)

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bergantung persepsi mereka tentang pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut Ikhsan Lubis (2010) Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal.

2.1.3 Pengetahuan dan pemahaman

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2016).

Carolina & Simanjuntak (2010), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan WP sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. *The deterrence model of tax compliance purports to explain taxpayer participation in such social enterprise by how they might be punished for free riding. The understanding of tax compliance and arguably of compliance with modern regulatory law in general must be more firmly grounded in the understanding of a wider range of institutions (Wei Cui, 2017).*

2.1.4 Persepsi yang baik

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Walsh (2012) *Perceptions of the prevailing social norms are also important determinants of compliance but appear to exert less influence on taxpayers than personal norms. The experiences of tax administrations in using behavioural research to influence taxpayers are examined.*

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap keberhasilan sistem perpajakan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan, pembayaran maupun pelaporan perpajakannya yang dapat dilakukan dengan cara sederhana dan dapat menghemat waktu pengerjaannya tersebut.

2.1.5 Kepercayaan

The penalty reform considerations presented by the deterrence and norms models of tax compliance remain important. A system of tax penalties that properly defines tax compliance but that does not effectively promote that compliance will have largely symbolic value. On the other hand, a system of tax penalties that effectively promotes taxpayer conduct not measuring up to the proper idea of tax compliance is pointless. Both aspects of tax penalty reform are necessary, and responsible reform ultimately must account for both the definitional and instrumental functions. Between the two, however, the definitional function is logically and practically the initial step; reforming penalties to

define the proper idea of tax compliance should be the first, but not the last, concern of legislative action (Doran, 2009)

Kepercayaan terhadap sistem hukum & pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu penilaian Wajib Pajak terhadap hukum dan lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

2.1.6 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi tingkat pendidikan, distribusi pendapatan yang merata dan perubahan struktur ekonomi (Rachman, 2016).

Dackehag, M & Hansson, A. (2012) finding empirical support for a non-linear relationship. Both low taxation of corporate and personal labor income enhance growth while higher rates retard growth. While the result for taxation of personal income is less stable, the results for the corporate tax rate are robust across specifications and choice of included variables. In addition, Dackehag, M & Hansson, A. also find support for taxation of dividends having a negative impact on economic growth even though this result is also less robust than that for the corporate tax rate. The results hence suggest that taxation of corporate income has a robust harmful impact on economic growth

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad 1999).

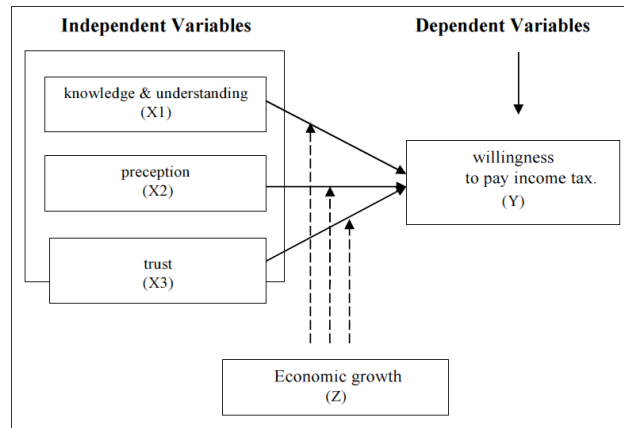
2.1.7 Kemauan membayar pajak

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat dibagi menjadi 2 konsep yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa (Violita, 2015). Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Sedangkan hasil penelitian Ortega. et al (2013) *suggest that reciprocity towards governments can be a significant source of improvement in tax collection in developing countries, where often tax rates and compliance are low. Other studies suggest that Latin American governments need to increase tax collection of the personal income tax. Increasing audits and fines (which is proxied with tax payership), which are presumably the most effective tools to increase tax collection, are not politically attractive tools for democratic governments.* Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung Indikator dalam penelitian adalah (i) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak (ii) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak (iii) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak (iv) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan (v) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

2.2 Kerangka pemikiran

The conceptual framework is an overview of the relationship between variables to be studied as described in the above theoretical basis (Mulya, Ali Sandy, 2017a & b), dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis penelitian

Based on the formulation of the problem, the theoretical basis and framework above, it can be arranged hypothesis (Mulya. Ali Sandy, 2019a & b) of factor affecting micro small and medium enterprises (SMEs) paying income tax with economic growth as a moderating, as follows:

- H1: Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
- H2: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
- H3: Tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
- H4: Pertumbuhan ekonomi memperkuat negatif pengaruh pengetahuan & pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
- H5: Pertumbuhan ekonomi memperkuat negatif pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
- H6: Pertumbuhan ekonomi memperkuat negatif pengaruh tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan

3. Metode penelitian

3.1 Populasi, metode pemilihan sampel, dan pengukuran variabel.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas pada populasi UMKM di kota Tangerang Selatan Indonesia. Kecamatan yang dipilih adalah kecamatan Serpong dan kecamatan Pamulang. Responden penelitian ini adalah para UMKM berdasarkan kategori peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) 23 tahun 2018. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Pengumpulan data lapangan menggunakan kuesioner dengan teknik *personally administered questionnaires*. Data yang digunakan adalah data primer (kuisisioner) dan sekunder (untuk variabel moderasi). Skala pengukuran untuk semua variabel primer menggunakan skala Likert dengan nilai maksimum 5 dengan rentang nilai dari nilai sangat setuju (5) sampai dengan sangat tidak setuju (1). Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berjumlah enam item pernyataan, variabel Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berjumlah lima item pernyataan, variabel Tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum berjumlah empat item pernyataan dan variabel Kemauan UMKM membayar Pajak Penghasilan berjumlah lima item pernyataan. Untuk variabel moderasi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi regional bruto (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Tangerang Selatan maka menggunakan skala rasio.

3.2 Metode analisis data.

Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji kualitas data. Pengujian kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data. Sebuah pernyataan dikatakan valid jika mempunyai dukungan kuat terhadap skor total. Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar 2015). Penelitian ini penulis menggunakan batas nilai Alpha 0,7 untuk mengetahui tingkat reliabilitas data. Alat pengujian hipotesis menggunakan WarpPLS 5.0

Evaluasi model pengukuran akan diketahui validitas dan reliabilitas masing-masing variabel manifes dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel laten. Sedangkan model struktural yang disebut juga dengan *inner model* menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten (Mulya, Ali Sandy, 2019c). Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat prosentase *variance* yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R^2 untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q squares test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner dan Profil Responden.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap pelaku UMKM di Wilayah Tangerang Selatan sebanyak 55 kuesioner. Kuisisioner yang kembali hanya 50 kuisisioner dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner sebesar 90,9%. Data yang bisa diolah sebanyak 50 kuesioner (90,9%). Pada appendix 1 disajikan profil responden berdasarkan jenjang pendidikan. Data tersebut, mayoritas responden memiliki pendidikan SLTA.

4.2 Hasil uji kualitas data.

4.2.1 Pengujian validitas.

Hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas data. Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa pernyataan dalam kuisisioner yang tidak valid yaitu Pernyataan X1.6 = $0,399 < 0,5 =$ Tidak Valid; Pernyataan X2.4 = $0,350 < 0,5 =$ Tidak Valid; Pernyataan Z1*X1.6 = $0,399 < 0,5 =$ Tidak Valid; Pernyataan Z1*X2.4 = $0,350 < 0,5 =$ Tidak Valid. Berdasarkan hasil dari analisis diatas, menunjukkan tidak semua butir pernyataan dapat digunakan sehingga harus dibuang beberapa pernyataan agar memenuhi syarat validitas, sehingga hasil yang keluar seperti dalam appendix 2

Berdasarkan appendix 2 dapat disimpulkan semua indikator dikatakan valid/menjadi alat ukur, karena memiliki nilai P-value $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas (Ghozali, 2015).

4.2.2 Pengujian reliabilitas.

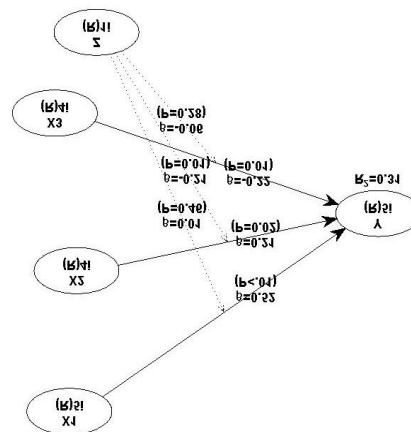
Reliabilitas merupakan suatu alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konstanta atau stabil dan waktu ke waktu. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2015). Nilai composite reliability dan cronbach alpha untuk semua variabel $> 0,70$ Hasil pengujian dengan WarpPLS5.0 pada appendix 3.

Nilai composite reliability dan *croanbach alpha* menunjukkan semua variable $> 0,70$ dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan didalam semua variabel adalah reliabel, artinya bahwa hasil pengukuran variabel konsisten.

4.2.3 Model fit indikator

Hasil pada tabel dibawah dapat dilihat model mempunyai *fit* yang baik, dimana nilai P-value untuk APC (*Average Path Coefficient*) dan ARS (*Average R-squared*) adalah $P < 0,05$ hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga dengan nilai AVIF (*Average Variance Inflation Faktor*) yang dihasilkan yaitu 1,724 yang berarti < 5 . Hal ini mengartikan tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen (eksogen). Hasil pengujian dengan WarpPLS5.0 pada appendix 4

4.2.4 Hasil uji hipotesis



Gambar2: Hasil Pengujian Hipotesa

Tabel 1: Uji T

No	Path	Coefficient	P-Value	P-Value	Keputusan
1	X1 → Y	0.520	0.001	<0.05	Ho ditolak
2	X2 → Y	0.207	0.015	<0.05	Ho ditolak
3	X3 → Y	-0.219	0.011	<0.05	Ho ditolak
4	Z*X1 → Y	0.010	0.461	>0.05	Ho diterima
5	Z*X2 → Y	-0.212	0.013	<0.05	Ho ditolak
6	Z*X3 → Y	-0.057	0.282	>0.05	Ho diterima

Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0

** Significant level at 5%

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan (Y) dengan nilai P-value < 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar 0,520 atau dengan kata lain Ho ditolak (Ha diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai P-value < 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar 0,207 atau dengan kata lain Ho ditolak (Ha diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan (Y) dengan nilai P-value < 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar -0,219 atau dengan kata lain Ho ditolak (Ha diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X1) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan (Y) dengan nilai P-value > 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar 0,010 atau dengan kata lain Ho diterima (Ha ditolak) yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa **Interaksi** persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (**X2**) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai *P-value* < 0,05 serta nilai *path* koefisiennya sebesar -0,212 atau dengan kata lain H_0 ditolak (H_a diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa **Interaksi** tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum (**X3**) dengan moderasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Y dengan nilai *P-value* > 0,05 serta nilai *path* koefisiennya sebesar -0,057 atau dengan kata lain H_0 diterima (H_a ditolak) yang artinya tidak terdapat yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan kepada hukum dan pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil pengujian dengan *WarpPLS 5.0* model persamaan regresi yang dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y = 0,52X_1 + 0,21X_2 - 0,22X_3 + 0,01X_1 * Z - 0,21X_2 * Z - 0,06 X_3 * Z$$

4.2.5 Koefisien determinasi

Nilai *R square* menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2015). Semakin tinggi nilai *R square*, maka variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model semakin baik dalam menjelaskan variabel terikat. *Adjusted R squared Coefficient* senilai 0,268 artinya Besar kontribusi pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektivitas sistem perpajakan dan Tingkat Kepercayaan terhadap hukum dan pemerintahan terhadap Kemauan UMKM membayar pajak penghasilan sebesar 26,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini.

4.3 Interpretasi hasil penelitian

Pengetahuan & pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan Pengetahuan & pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh signifikan, berarti kemauan UMKM membayar pajak penghasilan meningkat. Jika seseorang telah memahami dan mengerti aturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan ketaatan wajib pajak, karena mengetahui efek atas kelalaian tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dianggap sebagai salah satu kekuatan perpajakan yang dapat menekan ketaatan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Permadi (2013).

Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan UMKM Membayar Pajak Penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh signifikan, berarti kemauan UMKM membayar pajak penghasilan meningkat. Diharapkan persepsi yang baik terus meningkat dari UMKM, sehingga kemauan untuk membayar bisa ditingkatkan guna menambah penerimaan pendapatan Negara dari sektor pajak.

Tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh signifikan, berarti kemauan UMKM membayar pajak penghasilan tetap dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan rasa nasionalisme terhadap negara.

Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengetahuan & pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengetahuan & pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh tidak signifikan, berarti pertumbuhan ekonomi regional bruto mejadi variabel moderating tidak memperkuat dukungan pengetahuan & pemahaman kepada kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Pertumbuhan ekonomi regional bruto baik dalam keadaan meningkat atau menurun, tidak mempengaruhi kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Pertumbuhan ekonomi memoderasi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh signifikan, berarti pertumbuhan ekonomi bisa menjadikan dorongan kemauan UMKM membayar pajak.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi memoderasi tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai pengaruh tidak signifikan, berarti pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat dorongan pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sistem yang dirancang pemerintah sudah baik bukan karena pertumbuhan ekonmi tapi lebih dominan berita negatif di media cetak, eletronik, *etc* yang mempengaruhi kemauan UMKM membayar pajak.

5. Kesimpulan

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat pengaruh interaksi pengetahuan & pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum & pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memperkuat interaksi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan

6. Limitasi dan studi lanjutan

Sesuai surat edaran dari Kepala Kanwil Banten No S-508/WPJ.08/2017 point 3(tiga) bahwa izin riset yang diajukan ke Kantor Wilayah DJP Banten berasal dari Universitas dengan kedudukan *tax center* berada di Kanwil Banten, oleh karena itu peneliti belum bisa mendapatkan data tentang penerimaan pajak penghasilan UMKM di Kanwil Banten dari 5 (lima) tahun sebelum penelitian. Atas dasar tersebut penulis menggunakan populasi UMKM di kota Tangerang Selatan Indonesia dengan kecamatan yang dipilih adalah kecamatan Serpong dan kecamatan Pamulang

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil responden yang lebih banyak dengan menggunakan metode pemilihan sampel lain yang memiliki probabilitas keterwakilannya lebih presisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan Universitas Budi Luhur yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini

REFERENSI

- Ajzen, Cek. (1991) The theory of planned behavior. *Organization Behavior and human decision processes* 50, 170-21
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Carolina, Verani. & Simanjuntak, Timbul H. (2009). *Pengaruh tax knowledge dan persepsi tax fairness terhadap tax compliance wajib pajak badan yang terdaftar pada kpp madya bandung*. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”
- Dackehag, M & Hansson, A. (2012) *Taxation of Income and Economic Growth: An Empirical Analysis of 25 Rich OECD Countries*. School of Economics and Management.
- Doran, Michael (2009). *Tax penalties and tax compliance*, Harvard Journal on Legislation, Vol. 46.
- Ghozali, Imam dan Hengky L. (2015). *Partial least squares konsep, metode dan aplikasi menggunakan program warppls 5.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: BP UNDIP.
- Harold Kelley (1973). *Atribution theory*, <http://www.albana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-haroldkelley-1973.html> , Accessed may 15, 2014
- Helhel, Y. & Ahmed, Y. (2014). *Factors affecting tax attitudes and tax compliance: a survey study in yemen*. *European Journal of Business and Management*, Vol.6, No.22.
- Ikhsan Lubis, Arfan (2010). *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi keperilakuan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi
- Mulya, Ali Sandy (2017a). Effect generic strategy and value-added companies on enterprise sustainability with investment opportunity as intervening variable: empirical evidence of companies listed on idx, myx, pse, sgx and set. *International Journal of Economic Research*, ISSN: 0972-9380, Serials Publications Pvt. Ltd, Volume 14, Number 11.
- _____ (2017b). Tax amnesty program can be useful in making the best decisions and optimal in making an investment decision: An empirical analysis. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, ISSN: 1311-8080, Volume 116 No. 24 2017, 449-465.
- _____ (2019a). Implementation of corporate social responsibility and good corporate governance can reduce the amount of tax avoidance: Empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Restaurant Business* ISSN: 0097-8043, Volume 118 Issue 4, April

- _____ (2019b). Agresivity of taxes with aggressivity of financial statements on disclosure of corporate social responsibility: empirical study of mining companies in Indonesia. *International Journal of Restaurant Business* ISSN: 0097-8043, Volume 118 Issue 6, June.
- _____ (2019c). *Kecenderungan tekanan keuangan mendorong perbankan melakukan penghindaran pajak*, Simposium Nasional Akuntansi XXII Papua.
- Mutmainah, D.A. (2016) *Contribution of UMKM to GDP translucent more than 60 %*
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>
- Ortega.D, Ronconi, L., Sanguinetti, P. (2013). *Reciprocity and willingness to pay taxes: evidence from a survey experiment in Latin America, centro de investigacion y accion social (cias)*.
- Permadi, et al. (2013). Studi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas: kasus pada KPP pratama tampan Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol 21 No 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 46. (2013). *Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*
- Rachman, S. (2016). Analisis pengaruh perkembangan perkembangan usaha kecil dan menengah sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makasar. *ojs.unm.ac.id/administrare*, Vol. 3 No. 2.
- Siregar S. (2015). *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi spss versi 17*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudjana. N. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). *Dampak program sunset policy terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo. (2009). *Dampak program sunset policy terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar*. www.priyohari.files.wordpress.com/19/10/2010/.
- Violita, Poppy Putri. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WPOP di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Walsh, Keith (2012). *Understanding taxpayer behaviour-new opportunities for tax administration*, *The Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 3, Autumn, 2012, pp. 451–475
- Wei Cui, Peter A.(2017). *Taxation without information: the institutional foundations of modern tax collection*, Allard School of Law, University of British Columbia.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*, Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Yuliansyah, Y. and Jermias, J. (2018). Strategic performance measurement system, organizational learning and service strategic alignment: Impact on performance. *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 34 No. 4, pp. 564-592.

Appendix 1 Profil Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Diploma	17	34,0	34,0	34,0
S2	3	6,0	6,0	40,0
SLTA / s	29	58,0	58,0	98,0
SLTP / s	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Hasil output SPSS v.22

Appendix 2 Uji Validitas

	X1	X2	X3	Y	Z	Z*X1	Z*X2	Z*X3	Type (a)	SE	P value
X1.1	0.729	0.053	0.148	0.118	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.082	<0.001
X1.2	0.801	-0.054	-0.250	-0.122	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.080	<0.001
X1.3	0.636	0.002	-0.083	0.221	0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.084	<0.001
X1.4	0.704	-0.062	-0.027	0.092	-0.000	0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.083	<0.001
X1.5	0.544	0.086	0.302	-0.355	0.000	0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
X2.1	-0.033	0.826	-0.130	-0.077	0.000	-0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.080	<0.001
X2.2	0.039	0.887	0.102	-0.021	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.079	<0.001
X2.3	0.088	0.688	-0.259	0.004	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.083	<0.001
X2.5	-0.076	0.891	0.219	0.089	0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.078	<0.001
X3.1	-0.047	-0.094	0.950	0.133	0.000	0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.077	<0.001
X3.2	-0.228	-0.069	0.928	0.138	0.000	-0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.078	<0.001
X3.3	0.252	0.059	0.860	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.079	<0.001
X3.4	0.044	0.116	0.890	-0.021	0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.079	<0.001
Y11	-0.188	0.230	0.095	0.749	0.000	-0.000	0.000	0.000	Reflect	0.082	<0.001
Y12	0.143	0.014	-0.135	0.738	-0.000	0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.082	<0.001
Y13	-0.085	-0.149	0.000	0.889	0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.079	<0.001

Y14	-0.069	-0.015	0.160	0.853	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	Reflect	0.079	<0.001
Y15	0.222	-0.050	-0.142	0.764	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.081	<0.001
Z1	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	0.000	0.000	-0.000	Reflect	0.076	<0.001
Z1*X1.1	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.729	0.080	0.142	Reflect	0.082	<0.001
Z1*X1.2	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.801	-0.067	-0.246	Reflect	0.080	<0.001
Z1*X1.3	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.636	0.045	-0.096	Reflect	0.084	<0.001
Z1*X1.4	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.704	-0.047	-0.031	Reflect	0.083	<0.001
Z1*X1.5	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.544	-0.001	0.323	Reflect	0.086	<0.001
Z1*X2.1	-0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.071	0.826	-0.126	Reflect	0.080	<0.001
Z1*X2.2	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.887	0.108	Reflect	0.079	<0.001
Z1*X2.3	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.098	0.688	-0.258	Reflect	0.083	<0.001
Z1*X2.5	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.025	0.891	0.209	Reflect	0.078	<0.001
Z1*X3.1	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.021	-0.071	0.950	Reflect	0.077	<0.001
Z1*X3.2	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.155	-0.047	0.928	Reflect	0.078	<0.001
Z1*X3.3	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.099	0.010	0.860	Reflect	0.079	<0.001
Z1*X3.4	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.044	0.114	0.890	Reflect	0.079	<0.001

Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0

Appendix 3 Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	Composite Reliability Coefficients	Keputusan CR > 0,7	Cronbach's Alpha Coefficients	Keputusan CA > 0,7
X1	0.816	Reliable	0.717	Reliable
X2	0.896	Reliable	0.843	Reliable
X3	0.949	Reliable	0.928	Reliable
Y	0.899	Reliable	0.858	Reliable
Z	1.000	Reliable	1.000	Reliable
Z*X1	0,816	Reliable	0,717	Reliable
Z*X2	0,896	Reliable	0,843	Reliable
Z*X3	0,949	Reliable	0,928	Reliable

Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0

Appendix 4 Model Fit Indikator

Fit Indikator	Required
Average path coefficient (APC)=0.204, dengan P=0.008	Good if P<0.05
Average R-squared (ARS)=0.312, dengan P = 0.001	Good if P<0.05
Average adjusted R-squared (AARS)=0,268, dengan P=0.001	Good if P<0.05
Average block VIF (AVIF)=1.724	Good if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Sumber: data diolah WarpPLS 5.0